

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM  
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MA DARUSSLAM  
DERU BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RAHMATULLOH**  
**D03216030**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Dosen pembimbing**

**Dr. Hanun Asrohah M. Ag.**  
**19684101995032002**

**Ali Musthofa M. Pd.**

**197612252005011008**

**PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**

**JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2020**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RAHMATULLOH

NIM : D03216030

JUDUL : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI  
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI  
MA DARUSSALAM DERU BOJONEGORO

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Surabaya, 23 Juni 2020

Pembuat Pernyataan



RAHMATULLOH

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

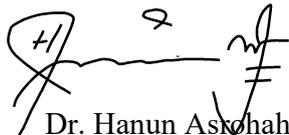
Skripsi oleh:

NAMA : RAHMATULLOH  
NIM : D03216030  
JUDUL : MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
MELALUI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI  
MA DARUSSALAM BOJONEGORO

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 20 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Hanun Astohah M. Ag  
19684101995032002

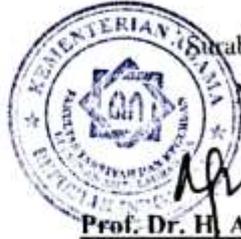
Pembimbing II



Ali Musthofa. M.pd  
197612252005011008

**PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Skripsi oleh Rahmatulloh ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



Surabaya, 23 Juni 2020

Mengesahkan,

Dekan,

**Prof. Dr. H. Ali Masud, M. Ag, M. Pd. I**

**NIP. 196301231993031002**

Penguji I,

**Dr. Arif Mansyuri, M. Pd**

**NIP. 197903302014111001**

Penguji II,

**Machfud Bachtiar, M. Pd**

**NIP. 197704092008011007**

Penguji III,

**Dr. Hanun Asrohah, M. Ag**

**NIP. 196804101995032002**

Penguji IV,

**Ali Mustofa, M. Pd**

**NIP. 197612252005011008**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAHMATULLOH  
NIM : D03216030  
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/ MPI  
E-mail address : Virusrahmatvirus@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM BATUAN  
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MA DARUSSALAM DERU BOJONEGORO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2020

Penulis

Rahmatulloh

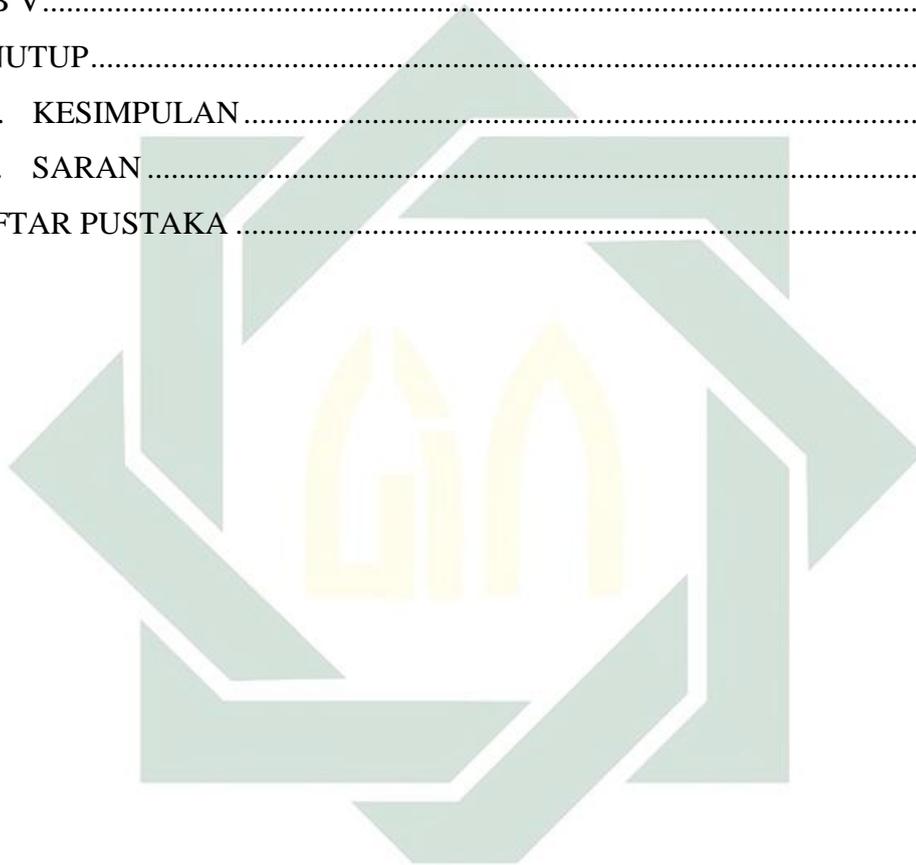








1. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS di Madrasah Aliyah Darusslam Bojonegoro.....	87
2. Pelaksanaan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Deru Bojonegoro.....	96
3. Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro.....	100
BAB V.....	104
PENUTUP.....	104
A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan adalah faktor dalam pencapaian tujuan nasional negara indonesia yang sudah tercantumkan dalam Undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 pada pasal 31 ayat 1s/d 3 dinyatakan bahwa : (1) setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mendedikasikan kehidupan bangsa. Sesuai dengan hal tersebut bahwasanya begitu penting pendidikan sebagai upaya mewujudkan tujuan nasional. Maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa.<sup>1</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya, dunia pendidikan di indonesia masih memiliki beberapa persoalan yang sangat krusial yang harus segera dibenahi baik oleh pemerintah, madrasah dan masyarakat agar mutu dalam pendidikan di indonesia mampu menjawab amanah yang terdapat dalam undang-undang.

Menurut Handayani bahwa persoalan pendidikan antara lain adalah kurangnya tenaga guru yang profesional, kinerja dan kesejahteraan guru yang

---

<sup>1</sup> UUD Republik Indonesia pasal 31 ayat 1-3



Kompetensi bisa berupa pelatihan yang telah diselenggarakan pihak sekolah atau dari pemerintah dengan tujuan pendidik dan tenaga pendidikan berkompetisi dalam bidangnya, mudah dalam mengatasi segala problematika yang dihadapi dalam pekerjaan di ruang lingkup lembaga pendidikan.

Standar sarana prasarana, karakter dari sebuah institusi pendidikan yang mempunyai kualitas tinggi ialah memiliki sarana prasarana yang memadai, dari segi ruang belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dan semuanya dalam keadaan baik, artinya semua masih bisa digunakan dengan layak.

Standar pembiayaan pendidikan, pembiayaan meliputi 3 hal yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggara dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Standar penilaian pendidikan, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pemerintah memiliki delapan standar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan melalui standar pembiayaan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan standar pembiayaan memiliki peran yang sangat penting yang masuk dalam kategori pendidikan pemerintah.

Dapat dikatakan bahwasanya tanpa adanya biaya kegiatan apa saja tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Terlebih dalam proses pendidikan dalam sekolah biaya yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah maupun orang tua harus di gunakan sebaik mungkin dan dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Dapat diartikan bahwa setiap biaya harus digunakan secara tepat

sesuai dengan kebutuhan dalam pencapaian dan tujuan yang diinginkan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sehingga akan menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang telah diharapkan pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan yang tidak mendapatkan dukungan biaya, maka proses pendidikanpun akan terganggu dan tidak akan mencapai target yang diinginkan hanya akan ada sebuah impian jika tidak didukung dengan biaya yang memadai.

Anggaran untuk menunjang pendidikan bukan hanya berupa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ataupun biaya anggaran yng berupa anggaran biaya pendapatan daerah (APBD), tetapi biaya dapat bersumber dari masyarakat umum. Dalam hal biaya yang didapatkan sekolah melalui peserta didik (Orang tua). Biaya yang diterima oleh pihak sekolah tidak hanya dari pemerintah saja melainkan ada campur tangan masyarakat dalam donatur anggaran pendidikan. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pembiayaan pendidikan merupakan keseriusan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Untuk mencapai tujuan dan kemajuan yang akan mengantarkan pada pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya.

PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan pada pasal 2 bahwasanya (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat (2) masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (a) penyelenggaraan (b) peserta





Selain hal tersebut sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola biaya juga mempunyai pengaruh besar terhadap ketercapaiannya tujuan pendidikan. Banyaknya biaya yang dikeluarkan tanpa adanya kemampuan dalam pengelolaan manajemen biaya, maka yang terjadi adalah pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran dan pemborosan sementara.

Proses pendidikan akan mengacu pada prinsip transparansi. Kejelasan mengenai hal yang menyangkut tentang pembiayaan harus dapat dilaporkan dan pertanggungjawabkan secara terperinci. Tidak hanya sebatas pada pelaksanaannya saja akan tetapi perlu adanya penyajian laporan yang jelas yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang sudah menyangkut tentang pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan secara detail yang sudah dicatatkan dalam laporan yang dibuat. Kalaupun memang dikeluarkan untuk pelaksanaan program, harus jelas program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu.

Prinsip transparansi ini sangat diperlukan dalam pembiayaan pendidikan di Indonesia. Hal ini dilakukan agar tersalurnya anggaran yang diterima pada program untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau tidak. Jika tidak maka harus segera ditindak lanjuti dan mencari solusi dan jalan keluar yang baik. Adanya asas transparansi biaya pada pembiayaan pendidikan dapat mengantisipasi segala anggapan yang bersifat negatif dari berbagai pihak.

Pengeluaran maupun pemasukan harus dijelaskan dalam pembukuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Adanya anggapan yang

bersifat negatif dari berbagai pihak karena tidak adanya transparansi dana dalam pertanggungjawaban semua anggaran yang sudah dipakai. Pengelolaan pembiayaan sudah dilakukan dengan prosedur dan mekanismen yang ditetapkan. Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan harus mempunyai dampak untuk kemajuan dalam bidang pendidikan baik dalam pengeluaran maupun berapapun uang maupun barang memiliki dampak yang signifikan pada pembangunan bidang pendidikan.

Semua pengeluaran yang telah dilakukan dalam biaya pendidikan dimuat dalam rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM). Semua dana yang telah dikeluarkan oleh lembaga pendidikan baik berupa uang atau barang, harus memiliki kejelasan runtutan tertulis dalam rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM).

Manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan mutu prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam rangka manajemen berbasis sekolah, yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dan sesuai dengan keperluan masing masing sekolah.

Hasil pengamatan awal yang peneliti lakukan di MA Darussalam Deru Bojonegoro beralamatkan di JL raya puk no 321 desa deru kecamatan sumberrejo kabupaten Bojonegoro, sebagai lembaga dibawah naungan

Kementrian Agama dengan keungulan sebagai madrasah yang berlandaskan iman dan taqwa serta unggul dalam berprestasi. Dari survey awal yang telah dilakukan peneliti, bahwasanya kondisi madrasah ini mengelola sumber dana pendidikan dari BOS. Dengan demikian kiranya madrasah ini perlu merencanakan sumber pembiayaan pendidikan yang lebih luas lagi kualitas pendidikan di MA Darussalam Deru Bojonegoro ini mengacu pada 8 standart nasional pendidikan. Standar isi, standar proses, standar kelulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, stndar pembiayaan, standar penilaian.

Dari standar tersebut standar pembiayaan yang menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pendidikan. Dikarenakan peserta didik yang berdominasi keluarga berekonomi menengah kebawah. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan demi berjalannya proses kegiatan membutuhkan pengelolaan keuangan yang professional baik dalam pencarian sumber dana atau pedistribusiannya dana MA Darussalam Deru Bojonegoro dalam mengelola keuangan dipegang oleh bendahara umum, komite dan dibantu oleh kepala madrasah sebagai biaya masuk maupun keluar.

Dari paparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN MELALUI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI MA DARUSSALAM DERU BOJONEGORO** ”









meningkatkan kualitas SDM SMP Global madani mengalokasikan dana untuk kegiatan ekstrakurikuler. SMP ini telah sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi islam keadilan, kejujuran, amanah, transparasi dan akuntabilitas. Ini ditunjukkan adanya perbedaan antar golongan, guru sangat objektif kepada siswa. Manajemen tidak pernah memberikan data yang fiktif dan laporan keuangan tersusun rapi. Namun secara pembiayaan SMP Global madani belum perspektif islam karena dalam islam pembiayaan pendidikan dikelola secara penuh oleh Negara.

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad faizal fahmi dengan judul Implementasi Manajemen Pembiayaan Di Madrasah Aliyah Pembaharuan Karang Bahagia Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha dan 2 orang guru sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini adalah di madrasah aliyah pembaharuan ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan sudah berjalan, akan tetapi belum tercapai secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan jawaban yang diperoleh dari 1 tata usaha dan 2 orang guru melalui pertanyaan yang diajukan.
3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudara Vita Andini Yulica dengan judul Manajemen pembiayaan pendidikan di yayasan *bakong pittaya scholl pattani Thailand* selatan.

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Proses perencanaan pembiayaan di *Bakong Pittaya School* dilakukan mulai awal bulan April sampai dengan Juni. Dalam tiga bulan tersebut, *Bakong Pittaya School* akan melakukan rapat bersama dewan yayasan dan guru, kemudian akan di sahkan oleh yayasan yang nantinya akan diajukan kepada pihak Kerajaan Thailand. Setelah diterima, pihak kerajaan akan memberikan dana sesuai dengan laporan jumlah siswa. Proses pembelanjaan pembiayaan di *Bakong Pittaya School* berupa dana yang diperoleh dari kerajaan sebesar 1,4 juta THB untuk seluruh biaya operasional, sedangkan biaya untuk gaji guru dan karyawan sebesar 1,2 juta THB. Proses Pengawasan dilakukan oleh departemen pendidikan setempat yang dilakukan pada awal dan akhir semester. Sedangkan dilingkup sekolah adalah manajer utama sendiri yang dilakukan secara insidental. Proses pertanggungjawaban pembiayaan di *Bakong Pittaya School* berupa laporan terperinci dengan memuat bukti pengeluaran dan pemasukan berupa kwitansi yang akan disampaikan setiap bulan Maret . Hambatan *Bakong Pittaya School* dalam pembiayaan pendidikannya adalah ketika dana yang diberikan oleh pihak kerajaan tidak cukup untuk memenuhi segala kegiatan.









Menurut pendekatan manajemen, pembiayaan pendidikan merupakan sebuah fondasi dasar dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu standart pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, sebagai syarat mencapai pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini pembiayaan pendidikan memiliki kompenen dalam kaitanya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung serta biaya rutin sekolah. Pembiayaan pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Akan tetapi pembiayaan pendidikan mempunyai kajian tersendiri dalam kaitanya dna mempunyai fungsi dala prosesnya. Fungsi pembiayaan pendidikan yautu bagaimana memperoleh biaya dan bagaimana mempergunakan biaya tersebut.

Manajemen pembiayaan pendidkan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya. Begitu juga minimnya biaya yang terdapat dlam lembaga pendidikan dapat mempengaruhi ketercapainya tujuan yang telah ditentukan. Biaya merupakan sebuah ruh dala setian kegiatan yang ada tanpa adanta biaya pastinya segala yang telah direncanakan tidak akan dapat ebrjalna dengan lancar.

Suatu biaya penting keberadanya dalam organisasi, terlebih pada dunia pendidikan. Akan tetapi bukan seberapa besar biaya tersebut direncanakan untuk apa dan bagaimana cara pelaksanaannya dalam menggunakan anggaran tersebut. Dapat dikatakan bahwa segala hal yang telah direncanakan sejak awal, apabila mendapati segala yang terjadi dalam proses berjalannya maka harus segera dimusyawarahkan dan secepatnya mencari alternatif atau jalan keluar yang baik.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada sistem pendidikan. Tanpa adanya biaya yang mendukung pada proses pelaksanaan pendidikan. Pendidikan yang bermutu hanya dalam anggaran yang sama. Segala hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pendidikan yang berjalan di sekolah berkaitan dengan biaya.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses mendapatkan dan mengatur pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa melalui sumber daya manusia lewat fungsi manajemen yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi sehingga tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan.

























- 4) Kepala madrasah penang jawab dan mengajak siswa MI yang akan lulus dan berpotensi melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi seperti MTs/ setara demikian pula juga bila teridentifikasi ada anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah. Kepala sekolah dalam mengelola dan BOS harus transparan dan akuntabel dan BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua siswa, memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada madrasah, tetapi hal itu harus diputuskan bersama dengan komite madrasah dan orang tua siswa.

- a. Tujuan dan Sasaran Dana BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program belajar 9 tahun yang bermutu, secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dan beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
- 2) Menggratiskan sekolah SD/MI dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
- 5) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di





honor tambahan di luar jam pelajaran dalam arti honor les biaya transportasi, dan akomodasi guru/siswa dalam rangka mengikuti lomba.

- 3) Pembiayaan ulangan harian, umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk foto copy, honor koreksi ujian dan honor dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- 4) Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis atau spidol, pensil, kertas, bahan praktikum buku-buku siswa, buku inventaris, langganan koran, majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari.
- 5) Pembiayaan perawatan sekolah yaitu pengecatan, perbaikan semua gedung sekolah, dan perbaikan fasilitas sekolah.
- 6) Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- 7) Pengembangan profesi keguruan seperti pelatihan dan pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transpor dari dan ke sekolah. Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah.





















































































Dari gambar di atas dapat dijelaskan alur pembukuan keuangan yang dilakukan MA Darusslam Deru dibagi dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran dana. Bendahara madrasah dalam penerimaan dan pengeluaran dana adalah bendahara madrasah dengan persetujuan kepala madrasah dan komite madrasah. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran dana tersebut diuraikan sebagai berikut:<sup>74</sup>

#### 1. Penerimaan Dana

Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan MA Darusslam Deru mempunyai beberapa tahapan, berikut hasil wawancara dengan bendahara madrasah :

jadi dalam hal penerimaan dana madrasah MA Darusslam Deru Bojonegoro mempunyai beberapa tahapan meliputi: 1) Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) Memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data keuangan, merupakan suatu kegiatan yang oleh lembaga madrasah ini dilakukan yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan

---

<sup>74</sup> Wawancara, bendahara MA Darussalam Bojonegoro, 28 April 2020

sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan madrasah. Diantaranya pelaporan kepada dewan guru, komite, dan pemerintah yakni pelaporan kepada kementrian agama kabupaten Bojonegoro.<sup>75</sup>

Penerimaan biaya di MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari pendapatan rutin. Pendapatan rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS. Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan antara lain dari pengawas keuangan, bendahara, pembantu direktur keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan berasal dari siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang keuangan, sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah diterima langsung pada bendahara. Biasanya uang yang telah diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan.<sup>76</sup>

#### a. Pengeluaran Dana

Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran dana di MA Darusslam Deru Bojonegoro tersebut dibagi menjadi dua yaitu biaya operasional dan biaya investasi. Biaya operasional menggunakan dana yang bersumber dari BOS.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Wawancara, bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020

<sup>76</sup> Wawancara, bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020

<sup>77</sup> Wawancara, bendahara MA Darusslam bojonegoro, 29 April 2020

Pelaksanaan pembukuan keuangan di MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan yang dilakukan oleh MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS , dan biaya investasi berupa sarana dan prasarana. Kemudian model pembukuan yang dipakai yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Wawancara, bendahara MA Daruslam Bojonegoro, 30 April 2020

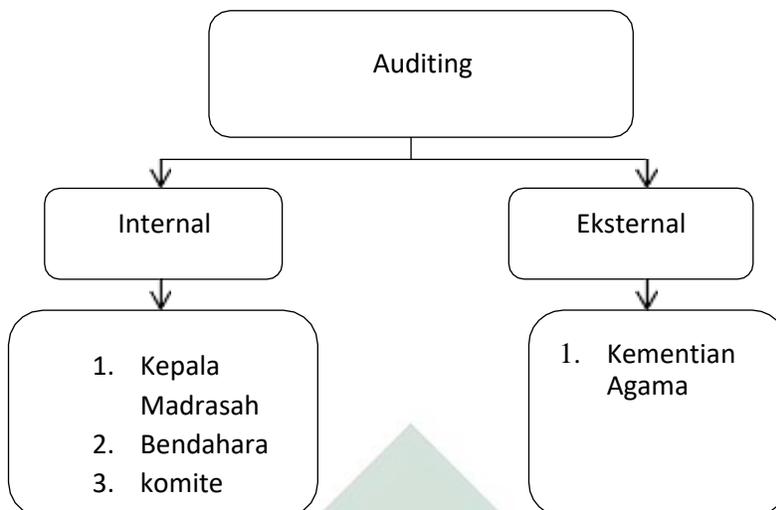
### **3. Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro**

Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (*auditing*) pada MA Darussalam Deru Bojonegoro, berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara madrasah yakni:

Auditing pembiayaan pendidikan di MA Darusslam Deru Bojonegoro dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, triwulan dan tahunan setiap pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran. Berikut data dokumentasi alur pengawasan yang penulis peroleh dalam pemeriksaan dan pertanggung jawaban pembiayaan pendidikan MA Darusslam Deru Bojonegoro :<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 april 2020



Gambar 4.3 auditing /Pengawasan Pembiayaan MA Darusslam Deru Bojonegoro

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa di MA Darusslam Deru Bojonegoro proses pengawasannya dilakukan dari dua arah yaitu dari internal dan eksternal. Walaupun lembaga ini tanahnya atas nama yayasan, tetapi untuk keuangan madrasah yayasan tidak mengikuti dalam kegiatan auditing. Berikut hasil wawancara :

a. Internal

Auditing / Pengawasan dan pertanggungjawaban ini dilakukan oleh kepada madrasah, bendahara, komite dengan berkala dan berkesinambungan dengan bendahara madrasah.<sup>80</sup> Diperkuat oleh hasil wawancara dengan bendahara madrasah, ya Tujuannya tidak lain membantu pengawasan keuangan madrasah agar tidak terjadi ketidaksesuaian penggunaan keuangan yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya. Pengawasan pembiayaan di MA Darussalam Deru

<sup>80</sup> Wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 1 mei 2020

dilakukan oleh kepala madrasah, komite madrasah dengan cara mengecek setiap 3 bulan sekali kepada bendahara.<sup>81</sup> Pengawasan pembiayaan di bagi menjadi dua, jika dana dari pendapatan dari sumber, infak siswa/orang tua, pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah, komite.<sup>82</sup> Dalam hal ini pengawasan dilakukan secara berkala untuk evaluasi diri madrasah terkait program kerja yang termuat dalam RKAM sehingga kami bisa membenahi dan memproyeksikannya<sup>83</sup> Sedangkan pengawasan kepala madrasah tersebut tidak hanya yang bersifat penggunaan internal saja melainkan penggunaan keuangan yang bersifat eksternal, seperti penggunaan yang tidak teranggarkan pada rancangan awal. Dan juga pengawasan ini berupaya membantu bendahara dengan mempersiapkan bukti-bukti keuangan yang membutuhkan legalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan anggaran. Meski demikian, bukan berarti bendahara melepaskan diri dari pengawasannya, oleh karena sifat dari pengawasan yang dilakukan kepala madrasah hanyalah sebagai pengawas yang bertujuan untuk memastikan pos penggunaan anggaranyang telah dirancang tidak melenceng dan terlaksana dengan maksimal.

Prinsip pelaksanaan pengawasan ini tergambar sebagai berikut: 1) Dilakukan terus menerus dan berkesinambungan; 2) Dilaksanakan secara efektif, diarahkan kepada jenis kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan, juga kegiatan

---

<sup>81</sup> Wawanaara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 2 mei 2020

<sup>82</sup> Wawanaara, komite MA Darusslam Bojonegoro, 2 mei 2020

<sup>83</sup> Wawanaara, bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 2 mei 2020

strategis; 3) Dilaksanakan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan pada penilaian yang objektif; 4) Berdasarkan kriteria yang jelas agar tidak bertindak subjektif; 5) Pencatatan dan pelaporan yang faktual, rasional, dan tepat waktu untuk mendeteksi penyimpangan; 6) Orientasinya adalah masa sekarang dan masa mendatang; 7) Sifatnya edukatif atau pembinaan meskipun terjadi penyimpangan dan kesalahan; dan 8) Melakukan pencegahan secara tuntas pada setiap kesalahan atau penyimpangan.

b. Eskternal

Kegiatan auditing/ pengawasan Di MA Darusslam Deru ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan menyesuaikan program monitoring, pendampingan dan pelaporan dari kementerian agama. biasanya kami dihubungi terlebih dahulu sebelum kegiatan ini dilakukan agar kami bisa mempersiapkan laporannya Baik untuk penggunaan keuangan yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental, baik yang dipergunakan dalam kurun waktu panjang maupun penggunaan anggaran yang dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat.<sup>84</sup>

Pengukuran tingkat keberhasilan atau tidak berhasilan penggunaan anggaran tersebut, maka MA Darusslam Deru mengikui sepenuhnya dari prosedur operasional penggunaan anggaran yang diberikan oleh pihak dinas atau instansi terkait. Selain pengawasan yang bersifat rutin, dinas atau instansi pemerintah lain yang telah juga

---

<sup>84</sup> Wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 5 Mei 2020

memberikan bantuan keuangan madrasah, juga akan serta melaksanakan pengukuran hasil kerja atas penggunaan keuangan yang telah diturunkan kepada madrasah.<sup>85</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan MA Darusslam Deru dari pihak internal oleh kepala madrasah, komite, bendahara dengan cara mengecek setiap triwulan sekali kepada bendahara. Sedangkan pengawasan dari pihak eksternal oleh kementerian Agama dalam satu tahun sekali.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program BOS di MA Darusslam Bojonegoro

Dalam hal Perencanaan pembiayaan MA Darusslama Deru memiliki Bendahara madrasah yakni ibu Heni Susanti yang memiliki wewenang untuk mengatur pembiayaan di madrasah dan dibantu oleh kepala madrasah, kepala tata usaha, dan komite. Berikut hasil wawancara dengan bendahara madrasah, kepala madrasah, dan kepala tata usaha, komite.<sup>86</sup>

#### a. Perencanaan Anggaran

Anggaran sering kali dimaknai sebagai suatu rencana, namun dalam bidang manajemen pembiayaan di lembaga pendidikan sering disebut dengan RKAM. Dalam istilah anggaran bukanlah suatu rencana.

<sup>85</sup> Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 5 Mei 2020

<sup>86</sup> Wawancara, kepala MA Darusslam Deru Bojonegoro, 25 April 2020

Istilah “rencana” telah memberikan penekanan atas pemakaian istilah “anggaran” sebagai suatu rencana.<sup>87</sup> Menurut Liphan Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, mengemukakan empat fase pokok sebagai berikut: 1) Merencanakan anggaran, yaitu kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran; 2) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang telah tersedia; 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu melaksanakan pembukuan, melakukan pembelajaran dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan, sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan; dan 4) Menilai pelaksanaan anggaran yaitu menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.<sup>88</sup>

Penganggaran pembiayaan di MA Darusslam Deru Bojonegoro terlihat dengan terlebih dahulu melakukan rencana penyusunan anggaran sesuai skala prioritas yang diutamakan, kemudian menentukan jumlah

---

<sup>87</sup> Hadar Nawawi, *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) hlm. 109

<sup>88</sup> Mulyono, *Konsep pembiayaan pendidikan* Hlm 165-166

dana yang dibutuhkan, yang kemudian akan di bagi ke dalam delapan komponen pendidikan dalam kurun waktu satu tahun. Pembagian ke delapan komponen itu adalah standar kelulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Dari ke delapan standar tersebut nantinya akan di bagi tiap *unit cost* biaya sesuai dengan kebutuhan yang di prioritaskan terlebih dahulu. Hal tersebut juga senada dengan teori yang dikemukakan oleh Nanang Fattah bahwa langkah-langkah penyusunan anggaran adalah sebagai berikut: 1) Menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, 2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya, 3) Menentukan program kerja dan rincian program, 4) Menghitung dana yang dibutuhkan. senada juga dengan Akdon yang menyebutkan bahwa prosedur pertama Mengidentifikasi kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran.<sup>89</sup>

Penganggaran pembiayaan di MA Darussalam Deru Bojonegoro melibatkan kepala madrasah, bendahara, dewan guru, komit untuk bersama-sama melakukan penyusunan penetapan anggaran sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan memperhatikan hal apa saja yang diutamakan dalam setiap kebutuhan program yang akan dikelola. Kemudian nantinya dalam *penginputan* jumlah biaya yang telah disepakati, akan dibantu oleh operator madrasah dalam memasukkan ke

---

<sup>89</sup> Rusdiana, *Pengelolaan pendidikan*, 230-231.

setiap komponennya sesuai dengan hasil akhir setelah anggaran tersebut di sahkan. Penyusunan anggaran pembiayaan MA Darusslam Deru dilakukan dengan agenda pertemuan rapat yang bertempat di kantor MA Darusslam Deru Bojonegoro. Penganggaran tersebut dilakukan setiap pada awal tahun anggaran. Kemudian setelah rangkaian prosedur penyusunan telah selesai, dilanjutkan dengan merevisi apabila ada yang kurang atau kelebihan anggaran, dilanjut dengan pengesahan yang dibubui dengan tanda tangan berstempel oleh kepala dan bendahara madrasah, diketahui oleh komite madrasah. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Asfila, dkk, dalam rangka mempergunakan pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan dengan pos yang telah diberikan oleh pemerintah, maka kepala sekolah melakukan musyawarah dengan komponen sekolah dalam merencanakan pembiayaan pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tersebut sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama. Perencanaan pembiayaan pendidikan biasanya dilakukan pada awal tahun walupun mungkin dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah belum turun, perencanaan pembiayaan pendidikan yang direncanakan tersebut dengan memprioritas hal-hal yang penting dan mendesak.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Asfila, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, No. 4, November 2015, 125

b. Sumber Dana MA Darusslam Deru Bojonegoro

Adapun sumber dana yang diperoleh MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari Dana BOS.<sup>91</sup> Akdon (2015) mengemukakan bahwa sumber-sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.<sup>92</sup> Senada dengan Irsan Habsyi, dalam jurnalnya mengemukakan jika sumber-sumber pendapatan sekolah bisa berasal dari pemerintah, usaha mandiri sekolah, orang tua siswa, sumber lain seperti hibah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyelenggara pendidikan bagi lembaga pendidikan swasta, serta masyarakat luas. Sumber pendapatan sekolah adalah dari pemerintah bisa berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Sumber keuangan pendidikan yang berasal dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sumber dana yang berasal dari orang tua siswa dapat berupa sumbangan fasilitas belajar siswa. Sumber dana dari dunia usaha dan industri dilakukan melalui kerja sama dalam berbagai kegiatan, baik bantuan berupa uang maupun berupa bantuan fasilitas sekolah”.

---

<sup>91</sup> Wawancara ,bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 27 Mei 2020

<sup>92</sup> Akdon, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 87.

c. Penyusunan dan RKAM MA Darusslam Deru Bojonegoro

Penyusunan RKAM di MA Darusslam Deru Bojonegoro melibatkan kepala madrasah, bendahara, tata usaha, komite. Kemudian dibantu oleh operator madrasah dalam proses penginputan dana per item ke dalam bentuk format dari kemendagri. Dalam kegiatan biaya operasional madrasah, pihak MA Darusslam Deru Bojonegoro menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional madrasah.

Dari tabel RKAM dokumentasi yang peneliti peroleh dapat dijelaskan bahwa operasional pembiayaan MA Darussalam Deru Bojonegoro dalam 1 tahun dikeluarkan sebanyak 2 kali. Pembagian operasionalnya mengacu kepada 8 standar pendidikan, yang masing-masing standar diuraikan kembali sesuai dengan kebutuhan biaya yang akan dikeluarkan. Pertama, standar kelulusan terdapat 3 program kegiatan utama yang membutuhkan biaya yakni kegiatan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan ujian dan penyusunan kriteria kelulusan. Kedua, standar isi terdapat tiga program utama yakni pengelolaan kurikulum 2013, pengembangan perpustakaan, pengawasan dan pengendalian kurikulum 2013. Ketiga, standar proses terdapat sepuluh program kegiatan yaitu kegiatan perlombaan sekolah, penerimaan peserta didik baru, pengadaan buku pelajaran/buku penerimaan peserta didik, pengadaan bahan habis pakai praktikum, pengadaan

buku pelajaran, penunjang pelajaran/buku bacaan, pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan program ekstra kurikuler, pengelolaan program kesiswaan, pengembangan keterampilan siswa, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan proses pembelajaran, peningkatan mutu proses pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai lima pelatihan laboran, pelatihan pustakawan, pelatihan dan peningkatan kualitas pendidik, pembinaan dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta manajemen madrasah.

Kelima, standar sarana dan prasarana mempunyai program pembelian alat multimedia pembelajaran, pembelian dan perawatan perangkat komputer, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pembelajaran madrasah, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana pendukung satuan pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan gedung, perawatan alat multimedia pembelajaran, perawatan madrasah /rehab ringan dan sanitasi madrasah kelas. Keenam, standar pengelolaan mempunyai program kegiatan supervisi, monitoring, dan evaluasi dan pengelolaan perkantoran. Ketujuh, standar pembiayaan yang mempunyai program utama yakni biaya penyusunan dan pelaporan, membantu peserta didik miskin, pembelian bahan habis pakai. Kedelapan standar penilaian

pendidikan dengan program yaitu, pelaksanaan ujian.

Seperti yang termuat dalam jurnal Zulfa Jamalie mengemukakan jika proses penyusunan anggaran di madrasah sangat sederhana dan kepala sekolah dapat melaporkan secara sederhana. Format yang digunakan untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasah pendapatan dan belanja sekolah (RKAM) meliputi : 1) sumber pendapatan antara lain BOS , 2) pengeluaran untuk kegiatan pembelajaran, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembangunan gedung dan sumber belajar, serta honorarium dan kesejahteraan. Penganggaran yang bersifat rencana dan dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam memajukan lembaga pendidikan, karena setiap lembaga pendidikan sangat memerlukan anggaran untuk menunjang kegiatannya, apalagi sekolah/madrasah swasta, maka anggaran harus disusun dan digunakan secara baik dan terarah.<sup>93</sup>

Muhajirin juga menjelaskan jika dalam penyusunan RKAM, kepala sekolah sebaiknya membentuk tim yang terdiri dari dewan guru dan pengurus komite sekolah. Setelah tim dan Kepala Sekolah menyelesaikan tugas, merinci semua anggaran pendapatan dan belanja sekolah, kepala sekolah menyetujuinya. Pelibatan para guru dan pengurus komite sekolah ini akan diperoleh rencana yang mantap, dan secara moral semua guru, kepala sekolah dan pengurus komite

---

<sup>93</sup> Zulfa Jamalie, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat*, Jurnal Fenomena, Volume 9, No 1, 2017, 32

sekolah merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana tersebut.<sup>94</sup>

Untuk RKAM jumlah rencana anggarannya adalah yang diperoleh dari sumber dana BOS. Untuk operasional sekolah dipusatkan dari pendapatan dana BOS sejumlah 141.000.000. Bila dilihat dari Undang- Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, maka dalam penyusunan anggaran RKAM di MA Darusslam Deru Bojonegoro terlihat terbuka untuk internal madrasah dan eksternal pada kemenag dalam keuangannya.

#### d. Pengesahan Anggaran

Pengesahan anggaran MA Darusslam Deru Bojonegoro disahkan oleh kepala madrasah dengan menandatangani hasil akhir dari rencana anggaran, kemudian diketahui oleh bendahara serta komite madrasah.<sup>95</sup> Sesuai dengan teori Hadar Nawawi yang menjelaskan bahwa, anggaran madrasah ini sifatnya masih rencana dan menyangkut keperluan proses kegiatan pendidikan, maka anggaran baru sah bila mendapat pengesahan dari komite madrasah<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Muhajirin, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat*, Jurnal Educational Management, ISSN 2252-7001 Vol 1, Februari 2012, 171.

<sup>95</sup> wawancara, kepala MA Darusslam Bojonegoro, 29 Mei 2020

<sup>96</sup> Haidar Nawawi, *Manajemen Strategis Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan*

Dapat disimpulkan bahwa proses penganggaran yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru meliputi empat langkah pertama menentukan rencana anggaran, kedua menentukan sumber dana, ketiga menyusun rencana anggaran RKAM, keempat proses pengesahan anggaran.

## **2. Pelaksanaan Pembukuan Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Deru Bojonegoro**

Sebagaimana dikenal pada umumnya, bahwa *accounting* merupakan pembukuan atas segala jenis keuangan yang ada pada sebuah lembaga. Demikian halnya yang dijalankan oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro dalam rangka menjamin mutu madrasah yang profesional dan memiliki sistem manajemen keuangan yang baik, maka disusunlah pembukuan keuangan yang sistematis. MA darussalam mempunyai bendahara madrasah sesuai data yang penulis peroleh, bendahara mengelompokkan dana penerimaan dan pengeluaran, dan membuat buku kas

### **a. Penerimaan Dana**

Sebagai langkah awal dalam menentukan pembukuan yang sistematis, maka pendataan dan pelaporan pelaksanaan keuangan ini meliputi: 1) Mengidentifikasi dan mengukur data keuangan, yakni mencatat segala bentuk transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis selama satu periode dalam buku jurnal. Pengukuran dengan menggunakan pengeluaran satuan mata uang; 2) Memproses data keuangan, yaitu pencatatan, pengelompokkan, dan pengikhtisaran yang

mencakup kegiatan ini adalah pencatatan transaksi seluruh data yang dikumpulkan secara kronologis kemudian digolongkan kedalam kategorinya dan disajikan secara ringkas; 3) Pelaporan data keuangan, merupakan suatu kegiatan yang oleh lembaga madrasah ini dilakukan yang dilakukan oleh lembaga madrasah secara berkala dan sistematis kepada pihak internal dan eksternal yang terkait langsung dengan madrasah. Diantaranya pelaporan kepada kepala madrasah, komite, dan pemerintah yakni pelaporan kepada kemenag melalui perwakilannya di kecamatan Sumberrejo .

b. Pengeluaran Dana

Sebagaimana digambarkan dalam peta konsep bahwa pengeluaran dana di MA Darussalam Bojonegoro yaitu biaya operasional menggunakan dana yang bersumber dari BOS.<sup>97</sup> Hal ini sesuai dengan peraturan menteri Agama No 90 tahun 2003 yaitu pembiayaan tersebut dipergunakan sebagai biaya investasi, biaya operasi dan personal yang mengarah pada lembaga pendidikan yang berkualitas. Biaya investasi madrasah meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya operasi madrasah meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan madrasah serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

---

<sup>97</sup> Wawancara, Bendahara MA Darusslam Bojonegoro, 30 Mei 2020

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan biaya operasi pendidikan tak langsung lainnya, Sesuai dengan teori Mulyasa mengemukakan bahwa pembayaran merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah seperti tenaga administrasi, guru, bahan-bahan, perlengkapan dan fasilitas.

Ongkos menggambarkan seluruh sumber yang digunakan dalam proses sekolah, apakah digambarkan dalam anggaran biaya sekolah atau tidak. Ongkos dari sumber sekolah menyumbangkan atau tidak terlihat secara akurat. Senada juga dalam teori Akdon struktur biaya pendidikan terdiri dari, a) biaya satuan pendidikan, b) biaya personal, dan c) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Sudah terlihat secara terperinci dana-dana yang dikeluarkan, dan dana masuk yang didapat. Kemudian dalam kegiatan pembukuan keuangan selain menggunakan acuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, madrasah tersebut menggunakan metode akrual basis dengan mencatat transaksi yang sedang dilakukan meskipun belum menerima atau mengeluarkan uang kas.

Jenis model yang digunakan dalam pembukuan menggunakan model turunan delapan standar nasional pendidikan. Kalau dalam teori Akdon biasa disebut dengan model *fishbone*, yaitu konsep model penentuan biaya sekolah/madrasah model tulang ikan dari Ishikawa. Penentuan biaya sekolah dikelompokkan menjadi 8 komponen, hal ini sesuai

dengan standar komponen pendidikan nasional.<sup>98</sup>

Penerimaan biaya di MA Darusslam Deru Bojonegoro berasal dari pendapatan rutin. Pendapatan rutin berasal dari bantuan pemerintah seperti BOS, dan infak siswa/orang tua. Sebagaimana menurut Siagian bahwa penerimaan merupakan sumber dana yang dibutuhkan oleh madrasah baik dari intern sekolah seperti iuran siswa maupun bantuan dari luar seperti instansi pemerintah . Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan ketentuan yang disepakati, baik berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah. Penerimaan keuangan madrasah tersebut bersumber dari pemerintah, penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukkan bagi pendidikan, uang sekolah dan sumbangan sukarela dari orang tua maupun masyarakat.

Proses penerimaan keuangan tergolong panjang melalui persetujuan antara lain dari pengawas keuangan, bendahara keuangan melalui kwitansi berita acara biasanya penerimaan berasal dari siswa penerimaan keuangan diterima oleh tata usaha bidang keuangan, sedangkan penerimaan keuangan yang berasal dari pemerintah diterima langsung pada bendahara. Biasanya uang yang telah diterima langsung disimpan dalam bank demi keamanan.<sup>99</sup> keuangan di MA Darusalam Deru Bojonegoro menggunakan pembukuan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, buku

---

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Siagian, Harbanga, *Administrasi Pendidikan Suatu Pendekatan Sistemik*, 133.

pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

Dari data di atas, disimpulkan bahwa dalam proses pembukuan yang dilakukan oleh MA Darussalam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan rutin. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS. Kemudian model pembukuan yang dipakai yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Sementara untuk jenis buku yang digunakan yaitu berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.

### **3. Auditing Pembiayaan Pendidikan Melalui Program BOS Di Madrasah Aliyah Darussalam Deru Bojonegoro**

Pelaksanaan pengukuran hasil kerja (*auditing*) pada MA Darussalam Deru Bojonegoro, dilaksanakan setelah seluruh penggunaan keuangan tiap bidang-bidang yang ditentukan secara berkala dilaporkan kepada bendahara madrasah. Dalam kurun waktu 1 (satu) bulan, triwulan dan tahunan setiap pengeluaran baik yang diperuntukkan post internal maupun post eksternal dilaporkan kepada bendahara, kemudian bendahara melakukan pendataan seluruh pengeluaran serta meminta bukti pengeluaran berupa nota atau kuitansi dari para pengguna anggaran.

Penilaian merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam kegiatan pembiayaan pendidikan. Dengan penilaian, kepala sekolah akan mengetahui tingkat keberhasilan pembiayaan program pendidikan dengan menggunakan dana dari pemerintah. Aktifitas penilaian ini dilakukan dalam rangka untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan RKAM kedepan, hingga dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang barang kali perlu dilakukan.

Pendapat penulis ini diperkuat oleh Hasibuan dalam buku manajemen pendidikan teori dan praktik bahwa evaluasi ialah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program sekolah/madrasah dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Informasi hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, berarti program tersebut efektif, jika sebaliknya, maka program tersebut dinyatakan tidak efektif atau gagal.<sup>100</sup>

Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini juga disebut dengan evaluasi ataupun evaluation involves auditing. Pertanggungjawaban (auditing) menurut Cormark (1970) merupakan

---

<sup>100</sup> Hasibuan, *Manajemen Pendidikan "aplikasi dalam penyusunan rencana pengembangan madrasah"*, (Jakarta: Putra Rafika, 2010), hlm 375.

pembuktian dan penentuan bahwa apa yang dimaksud sesuai dengan apa yang dilaksanakan, sedang apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas proses ini menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan dana kepada pihak- pihak yang terkait<sup>101</sup>

Evaluasi dana pendidikan di MA Darussalam Bojonegoro dengan melalui pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh kepala madrasah dan wakil kepala madrasah dengan cara mengecek setiap awal bulan serta akhir bulan kepada bendahara. Pengawasan bertujuan untuk memantau terhadap pelaksanaan manajemen keuangan di MA Darusslam Bojonegoro. Pemantauan ini dilakukan dengan cara mengetahui bukti-bukti atau transaksi yang sah baik pengeluaran maupun pemasukan keuangan. Selanjutnya kepala madrasah menilai hasil pantauanya apakah sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki atau belum yang selanjutnya diambil tindakan perbaikan terhadap hal-hal yang belum sesuai dengan yang dikehendaki. Pemeriksaan disini dilakukan terhadap pendapatan keuangan madrasah, pengeluaran keuangan madrasah serta pelampiran bukti transaksi yang digunakan.

a. Pendapatan Keuangan Madrasah.

Pemeriksaan terhadap pendapatan keuangan madrasah di MA Darusslam Bojonegoro dilakukan dari dua arah yaitu dari arah internal dan eksternal madrasah. Dari arah internal dilakukan oleh kepala madrasah, bendahara madrasah, komite madrasah dan dari eksternal madrasah dilakukan oleh pihak kementrian agama tingkat kabupaten kota. Pemeriksaan

---

<sup>101</sup> Mulyono, *Manajemen Berbasis Sekolah*, hlm 66.

ini menilai mengenai sumber-sumber dana yang bersumber dari pemerintah yaitu dana BOS.

b. Pengeluaran Keuangan Madrasah

Pemeriksaan terhadap pengeluaran keuangan madrasah bertujuan untuk menguji kebenaran jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah uang yang seharusnya ada. Jika dalam pemeriksaan terdapat selisih jumlah uang yang ada maka bendahara harus dapat menjelaskannya. Di MA Darusslam Bojonegoro pemeriksaan terhadap kas madrasah dilakukan kepala madrasah.

c. Pelampiran Bukti.

Pelampiran bukti-bukti transaksi pengeluaran keuangan madrasah baik yang nominalnya sedikit maupun nominalnya banyak. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pertanggungjawaban keuangan oleh bendahara dan kepala madrasah kepada komite madrasah, wali murid, dan kepada tim kementerian agama tingkat kabupaten kota setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan melalui program bos yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro meliputi empat langkah yaitu menentukan sistem perencanaan anggaran. Rencana anggaran, menentukan sumber dana, menyusun rencana anggaran kedalam format RKAM, dan proses pengesahan anggaran.
2. Pelaksanaan Pembukuan Melalui Program BOS yang dilakukan oleh MA Darusslam Deru Bojonegoro menggunakan dua jenis kegiatan yaitu penerimaan dana dan pengeluaran dana. Penerimaan dana berasal dari pendapatan rutin yaitu dari sumber BOS pusat. Sedangkan pengeluaran dana digunakan untuk biaya operasional madrasah yang bersumber dari BOS pusat. Model pembukuan yang dipakai yaitu model *fishbone* dengan mengelompokkan delapan standar nasional pendidikan. Serta jenis buku yang digunakan berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, buku pembantu kas, buku pemasukan internal, dan buku pengeluaran internal.
3. Auditing/ pengawasan pembiayaan pendidikan melalauai dana BOS MA Darusslam Deru Bojonegoro dilakukan dari dua arah yaitu pengawasan dari pihak internal madrasah dan eksternal oleh kementrian Agama.

## B. SARAN

Dengan memperhatikan pembahasan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Madrasah dalam pelaksanaan keuangan dengan dana BOS harus digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin agar tidak mengalami kekosongan keuangan dalam kas madrasah mengingat penyaluran dana BOS di salurkan selama tiga bulan sekali (triwulan).madrasah juga bisa menggali dana lain semisal dengan mengadakan wirausaha dengan masyarakat setempat, pengumpulan dana melalui pengajian.
2. Dalam penggunaan dana BOS dari pemerintah harus digunakan seoptimal mungkin agar kualitas MA Darussalam Bojonegoro bisa maksimal dan melakukan inovasi secara terus-menerus demi terwujudnya mutu madrasah yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing dengan lembaga yang lain.
3. Kepala madrasah dan bendaharawan untuk lebih meningkatkan pengawasan yang terkait penggunaan dana BOS. Untuk itu, perlu adanya langkah strategis untuk meningkatkan Pengawasan penggunaan keuangan madrasah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Pratowo, 2011, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta : Ar-ruzz Media, 2011)
- Arsyad Azhar, *Pokok Manajemen : Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan dan Eksekutif*, 2002 (yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Burhan Bungin. 2011, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Prenada Media Group)
- Barnawi dan M. Arigfin, 2012, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media)
- Danim, Sudarwan, 2008, *Visi Baru Manajemen Sekolah, Dari Unit Birokrasi ke Akademik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Didin Kurniadin dan imam machali, 2012, *manajemen Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiyaji Akbar, 2000, *Metodologi Peneliian Sosial*, (Jakarta : PT Bumi Aksara)
- Harsono, 2007, *Pengelolaan Pndiidkan* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher)
- Haidar Nawawi, 2005, *Manajemen Strategic Organisasi Non Prpfit Bidang Pemerintahan*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)
- Hasibuan, 2010, *Manajemen Pendidikan”aplikasi dalam penyususnan rencana pengembangan madrasah”*, (Jakarta: Putra Rafika)
- Hadari Nawawi dan Mimim Martini. 1992, *Penelitian Terapan*. ( Yogyakarta : Rajawali Press)
- Ibrahim Bafada, 2006, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Irianto Agus, 2010 *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembngunan suatu Bangsa*, (Jakarta : Kencana)
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).
- Muhammad Syafii Antonio dan Tim Tazkia, 2010, *Kepemimpinan dan Strategi Militer*,
- Meleong Lexy. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Moh. Kasiran. 2010, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Yogyakarta : Sukses Offset)
- Moleong Lexy. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)
- Mulyono, 2010, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, (Jogjakarta : Ar-ruzz media)
- Marno & Triyo Supriyanto, 2008, *Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan Islam*, (Bandung : PT Refika Aditama)
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta).
- Rusdiana, 2015, *Pengelolaan pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan ; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta)
- Sanjaya Wina, 2010, *Startegi Pembelajaran Berorientasi Standart Proses Pendidikan*, (Jakarta : Kencana)
- Sutikno M. Sobry, 2012, *Manajemen Pendidikan*, (Lombik : Holistica)
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabet)
- Sagala Syaiful, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan*
- T Hani Handoko, 2013, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPF E,)

## Jurnal :

Asfila, dkk, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pada Mtsn Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0156 pp. 123-129, Volume 3, No. 4, November 2015

Durotun Nafisah, dkk, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah*, Economic Education Analysis Journal, Vol 3 p-ISSN 2252-6544, e-ISSN 2502-356X, 2017, 790.

Muhajirin, 2012, Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat, Jurnal Educational Management, ISSN 2252-7001 Vol 1, Februari

Zulfa Jamalie, 2017, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat, Jurnal Fenomena, Volume 9, No 1

